

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PENYUSUNAN LAPORAN PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA

Wachid Mei Prihantoro

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: wachidme2605@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of accounting information systems in the preparation of calculations and Accountability Reports On Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, results of this study are expected to be used as inputs in the preparation of reports Calculation and Accountability (PPJ) that the preparation of reports PPJ can be run more effectively and as contributions to solving the problems faced by KPKNL the related statements PPJ. This research is a case study in KPKNL Surakarta, where there is a system weaknesses in the calculation and accountability reporting on KPKNL Surakarta. The scope of the study based on a survey of the preparation of reports by collecting qualitative and quantitative data with the determination of the subject. Determination of the subject based adjustment Sampling, which consists of three authorities. The data collection techniques questionnaires and interviews. Data were analyzed with Comparison Study. Results showed Preparation and Accountability report on the calculation of the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta been effective in accordance with the principles of internal control.

Keywords: *System, control, effective, accountable.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta khususnya pada Seksi Pelayanan Lelang adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan lelang dengan menyusun Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban, Salinan Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang, dan Laporan Realisasi Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Jenis/Asal Barang.

Penyusunan laporan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban KPKNL Surakarta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Direktorat Kekayaan Negara nomor Per-06/KN/2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Lelang memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang hasil Pelaksanaan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasilnya diharapkan dapat membantu Kepala Kantor selaku pimpinan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun dalam penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) KPKNL Surakarta sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Direktorat Kekayaan Negara nomor Per-06/KN/2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL, masih terdapat kendala yang timbul dalam penyusunan Laporan Perhitungan Dan Pertanggungjawaban (PPJ) karena penyusunannya dan perhitungannya masih manual yaitu dengan mengisi data per formulir laporan. Dengan demikian dalam penyusunan Pelaporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) harus mendapat perhatian dari manajemen agar proses penyusunan laporan Perhitungan Dan Pertanggungjawaban (PPJ) dapat berjalan dengan efektif .

Sistem Informasi tentang penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban (PPJ) yang efektif. diharapkan dapat memberikan informasi yang handal dan dapat menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan, harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, dan harus jelas maksud dan tujuannya. Untuk dapat menghasilkan informasi dengan karakteristik tersebut, data yang diproses dalam Sistem Informasi laporan perhitungan dan pertanggungjawaban (PPJ) harus data yang benar dan akurat agar menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Dengan demikian apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi pernah dilakukan oleh Ferdian (2010) yang meneliti dengan judul: “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada CV. Mitra Tanindo)”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2010) terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pembuatan Laporan Perhitungan Dan Pertanggungjawaban, permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pembuatan laporan. Sedangkan Ferdian (2010) lebih memfokuskan pada tujuan untuk merancang sistem informasi akuntansi untuk diterapkan pada CV. MITRA TANINDO.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Sistem Informasi Akuntansi pada Penyusunan Pelaporan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta Sudah Efektif”.

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu “ Untuk menganalisis efektifitas sistem informasi akuntansi pada penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di KPKNL Surakarta, berdasarkan hasil survai dan kemudahan memperoleh data dalam penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban pada KPKNL Surakarta .

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu data Primer yang digunakan yaitu data tentang penyusunan laporan PPJ melalui wawancara dan tanyajawab dengan Pelaksana pada Seksi Pelayanan Lelang selaku petugas pembuat laporan PPJ dan kepada Bendahara Penerimaan KPKNL Surakarta. Dan data sekunder yang digunakan yaitu Rician Penerimaan Uang Hasil Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang berisi informasi tentang nama

pemenang lelang, objek yang di lelang, Pemohon/Penjual dan rincian perhitungan hasil pelaksanaan lelang, buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Data dikumpulkan dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu yang pertama dengan metode wawancara, dengan kata lain segala kegiatan yang menghimpun (mencari data) atau informasi dengan jalan melakukan tanya jawab lisan dengan cara bertatap muka (*face to face*) dengan pegawai KPKNL Surakarta yang berkaitan dengan penyusunan laporan; Yang kedua metode observasi, melihat proses dan mengamati penyusunan laporan PPJ; Yang ketiga dengan dokumentasi, mengumpulkan data-data penyusunan dengan mempergunakan dokumen dokumen serta catatan-catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan pembuatan laporan PPJ.

Analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang akan disusun secara sistematis; Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisis perbandingan atau komparasi. Langkah analisisnya sebagai berikut:

Analisis sistem dan penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban KPKNL Surakarta untuk mengetahui bagian apa saja yang terkait dalam penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban serta prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam penyusunan laporan. Membandingkan sistem dan prosedur penyusunan laporan PPJ, teori-teori yang relevan untuk menilai efektif tidaknya pengendalian intern sistem dan prosedur penyusunan laporan PPJ ditinjau dari segi organisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang sehat. Mengidentifikasi kebaikan dan kelemahan sistem informasi akuntansi untuk penyusunan laporan PPJ pada KPKNL Surakarta dengan menganalisis flow chart prosedur-prosedur sistem informasi akuntansi penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban. Mengevaluasi sistem dan prosedur sistem informasi akuntansi pada perusahaan berdasar fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, dan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Memberikan rekomendasi dan perbaikan prosedur-prosedur sistem informasi akuntansi penyusunan laporan PPJ pada KPKNL Surakarta. Memberikan rekomendasi terhadap siklus penyusunan laporan, dokumen yang digunakan, fungsi-fungsi yang terkait, jaringan prosedur. Laporan efektif/tidak efektif berdasarkan data score yang diperoleh dari responden dengan menentukan indek minimum dan indeks maksimumnya. Nilai indeks minimum diperoleh dengan anggapan bahwa seluruh jawaban adalah "Tidak" (0). Dengan demikian nilai indeks minimumnya adalah skor dikalikan dengan n, yakni $0 \times 20 \times n = 0n$. Nilai indeks maksimum diperoleh dengan anggapan bahwa seluruh jawaban adalah "Ya" (1) maka nilai indeks maksimumnya adalah $1 \times 20 \times n = 20n$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dengan tahapan mulai dari menyusun daftar pertanyaan yang mencakup tentang masalah sistem pengendalian intern. Daftar pertanyaan yang telah disusun tersebut di berikan kepada pegawai bagian lelang dan pegawai bagian bendahara yang terlibat pada penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban. Alternatif jawaban yang disediakan dapat dijabarkan sebagai berikut: jawaban "Ya" skor 1, jawaban "Tidak" skor 0. Lalu menghitung jawaban responden penelitian dengan menggunakan daftar indeks. Berdasarkan data score yang diperoleh, selanjutnya digolongkan efektif, dan tidak efektif dengan cara menentukan indeks minimum dan indeks maksimumnya. Nilai indeks minimum diperoleh dengan anggapan bahwa seluruh jawaban adalah "Tidak" (0). Dengan demikian nilai indeks minimumnya adalah skor dikalikan dengan n, yakni $0 \times 20 \times n = 0n$; Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat dihitung besarnya nilai indeks minimumnya sebagai berikut: NilaiMinimum = $0 \times 20 \times 3 = 0$; Nilai indeks maksimum diperoleh dengan anggapan bahwa seluruh jawaban adalah "Ya" (1) maka nilai indeks maksimumnya adalah $1 \times 20 \times n = 20n$; Berdasarkan rumus tersebut maka dapat dihitung besarnya nilai indeks maksimum sebagai berikut NilaiMaksimum: $1 \times 20 \times 3 = 60$

Berdasarkan pada nilai indeks maksimum dan minimum tersebut maka akan diperoleh nilai interval di antara keduanya, yaitu sebagai berikut: Interval = nilai indeks maksimum - nilai indeks minimum = 60 - 0 = 60

Dalam kuesioner yang telah disusun terdapat 3 (tiga) alternatif jawaban, maka untuk mencari jarak intervalnya dapat dilakukan dengan cara membagi antara nilai interval dengan jumlah alternatif jawaban, yaitu: Jarak interval = $\frac{60}{3} = 20$

Untuk selanjutnya, dalam penelitian ini dilakukan perhitungan terhadap jawaban responden yang dapat disajikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah jawaban responden} &= \sum \alpha_0 + \alpha_1 = 0 + 60 = 60 \\ \frac{60}{60} \times 100 \% &= 100 \% \end{aligned}$$

Total jawaban responden yang berjumlah 100 persen tersebut kemudian diinterpretasikan terhadap kategori skor yang telah ditentukan, yaitu berada pada kategori skor jawaban ya = 100 persen yang berarti masuk dalam kategori efektif. Untuk menjawab hipotesis yang dikemukakan peneliti yaitu "Diduga sistem informasi akuntansi pada penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban KPKNL Surakarta sudah efektif" telah terbukti, karena setelah dilakukan analisis terhadap jawaban responden didapatkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi pada penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban KPKNL Surakarta sudah efektif.

Penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) KPKNL Surakarta mengacu pada Peraturan Direktorat Kekayaan Negara nomor Per-06/KN/2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL dan dilengkapi dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Fungsi yang terkait dalam penyusunan laporan PPJ pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, adalah sebagai berikut Fungsi Pejabat Lelang

adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat lelang membuat laporan pelaksanaan lelang; Fungsi Seksi Pelayanan Lelang bertugas mencatat dan mendaftarkan semua permohonan lelang dan memproses permohonan lelang hingga siap dilaksanakan lelang oleh pejabat lelang. Menerima laporan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang; Fungsi Bendahara Penerima adalah pegawai KPKNL yang ditunjuk dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang hasil pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Fungsi Bendahara Penerima bertanggung jawab menerima bukti setoran atau transfer atas pembayaran kewajiban lelang dan mencatat kedalam buku penjualan lelang dan buku kas umum, serta meneliti kelengkapan berkas pembayaran yang dilakukan oleh peserta lelang yang telah dinyatakan menang.

Berikut sistem Penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

Setelah Pelaksanaan Lelang selesai Pejabat Lelang meminta register nomor risalah lelang dan dicatat di Buku Register Permintaan Lelang; Apabila barang yang dilelang laku terjual, dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja seseorang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang harus melunasi harga terbentuk lelang dan bea lelang, yang kemudian bukti pembayaran diserahkan ke pejabat lelang;

Setelah Pejabat Lelang menerima bukti pelunasan dari pemenang lelang kemudian pejabat Lelang Membuat Tanda Bukti Masuk (TBM)/Rincian Penerimaan Hasil Lelang; TBM dilampirkan dengan bukti pembayaran pelunasan lelang tersebut diserahkan ke Bendahara Penerimaan KPKNL Surakarta;

Setelah menerima TBM dan bukti pembayaran tersebut Bendahara memeriksa bukti pelunasan tersebut di rekening penampungan lelang apakah setoran tersebut sudah masuk apa belum dan di cros cek dengan TBM apakah sesuai apa belum; Jika belum sesuai dengan TBM maka TBM tersebut dikembalikan ke Pejabat Lelang; Jika sesuai maka Bendahara membuat kuitansi hasil bersih lelang yang nantinya sebagai tanda terima hasil bersih yang diserahkan ke Pemohon Lelang; SSP Pembayaran Pajak Penghasilan Lelang, dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk bea lelang pembeli dan penjual;

Setelah selesai bukti pelunasan, SSP dan SSBP diserahkan ke Pejabat Lelang untuk lampiran pembuatan Laporan Pelaksanaan Lelang. Bendahara mempunyai arsip Tanda Bukti Kas Masuk (TBKM) untuk TBM, dan Tanda Bukti Kas Keluar (TBKK) untuk arsip pembayaran kepada pihak yang ber hak.

Setelah satu Periode/bulan TBM tersebut sebagai dasar pembuatan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban dengan mengurutkan Nomor Risalah Lelang yang tertera di TBM.

Berdasarkan Buku Register Permintaan Lelang dan TBM (Jika lelang Laku) dalam 1 periode tersebut dibuat terlebih dahulu Salinan Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang. Setelah input data-data TBM dalam 1 (satu) periode ke Salinan Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang akan diketahui jumlah pokok lelang, bea lelang, pph dan jumlah hasil lelang.

Konsep form Salinan Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang dicetak kemudian diserahkan ke bagian Bendahara untuk dikoreksi dan di cek pada penyetoran hasil lelang pada periode berjalan. Apabila belum dibayarkan pada periode pembuatan laporan maka akan dimasukkan pada kolom tunggakan, sedangkan yang sudah dibayarkan akan masuk dikolom penyetoran hasil lelang.

Setelah dikoreksi oleh Bendahara dan sudah diperbaiki oleh petugas pembuat laporan pada konsep form Salinan Buku Penjualan, Penyetoran Dan Tunggakan Hasil Lelang dicopy ke sheet baru dan diberi nama pengelompokan jenis lelang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelompokan lelang berdasarkan jenis/asal barang yang nantinya digunakan untuk membuat Laporan Realisasi Kegiatan Dan Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Jenis/Asal Barang..

Setelah laporan Salinan Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang selesai kemudian dibuat Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ). Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) berisi tentang Penerimaan dan Tunggakan pada periode berjalan yang diperhitungkan dengan Penyetoran/Pembayaran/Tunggakan pada tahun berjalan.

Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban juga berisi juga jumlah Penerimaan dan Tunggakan pada periode sebelumnya dan Penerimaan dan Tunggakan sampai dengan periode berjalan. Setelah laporan di cros cek dan dinyatakan sudah benar kemudian di cetak dan dan dimintakan tanda tangan ke kepala kantor sebagai laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban ke Kantor Wilayah satuan kerja KPKNL.

Berikut ini evaluasi sistem akuntansi penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban pada KPKNL Surakarta bila dibandingkan dengan teori adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas; Pada KPKNL Surakarta hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Instansi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi beberapa bagian/seksi; Setiap bagian/seksi mempunyai tugas masing-masing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tugas dan tanggung jawab dari beberapa bagian dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

Sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh KPKNL Surakarta terhadap penyusunan laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) dilihat dari segi Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas yaitu: Fungsi Pejabat lelang melaporkan

setiap pelaksanaan lelang ke fungsi pelayanan lelang sebagai laporan kegiatan pelaksanaan lelang; Penyusunan laporan PPJ dilakukan oleh fungsi/seksi Pelayanan Lelang, sedangkan fungsi bendahara melakukan koreksi laporan, hal ini dimaksud agar tidak terjadi kesalahan laporan PPJ; Pelaksana pembuat laporan pada fungsi pelayanan lelang mengotorisasi laporan yang kemudian diserahkan ke kepala seksi pelayanan lelang untuk diotorisasi dan diteruskan ke Kepala Kantor guna penandatanganan laporan Pertanggungjawaban untuk kemudian dikirim ke kantor wilayah satuan kerja; Sistem wewenang dan prosedur pencatatan, dalam organisasi, setiap tindakan hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap tugas.

Sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh KPKNL Surakarta terhadap penyusunan laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) dilihat dari segi Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yaitu: Laporan hasil pelaksanaan lelang berupa tanda bukti masuk (TBM) diotorisasi oleh Fungsi Pejabat Lelang yaitu para Pejabat Lelang; Laporan tanda bukti kas keluar (TBKK) diotorisasi oleh petugas bendahara dan kepala seksi bendahara; Laporan salinan buku penjualan lelang diotorisasi oleh bendahara dan diketahui oleh kepala seksi bendahara; Laporan Perhitungan dan pertanggungjawaban diotorisasi oleh kepala seksi Pelayanan Lelang dan ditandatangani oleh kepala kantor yang selanjutnya dikirim ke kantor wilayah sebagai laporan tiap periode; Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh KPKNL Surakarta terhadap penyusunan laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) dilihat dari segi Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi adalah: Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang; Dalam sistem pengendalian intern pada KPKNL Surakarta pelaporan pelaksanaan lelang berupa Tanda Bukti Masuk (TBM) sudah bernomor urut tercetak berdasarkan nomor register permintaan lelang dan telah diotorisasi oleh yang berwenang.; Pemeriksaan mendadak (surprised audit), dalam sistem pengendalian intern pada KPKNL Surakarta sudah dilakukan pemeriksaan rutin tiap semester oleh petugas dari kantor wilayah DJKN Semarang untuk memeriksa laporan pelaksanaan lelang.; Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Dalam sistem pengendalian intern pada KPKNL Surakarta penyusunan laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban melibatkan dua bagian/seksi dan mempunyai fungsi masing-masing.

Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

Dalam sistem pengendalian intern pada KPKNL Surakarta sudah dibentuk unit organisasi yang bertugas mengecek efektivitas sistem pengendalian intern yaitu Seksi Kepatuhan Internal.

Dari ke-empat unsur pengendalian intern, mutu karyawan merupakan unsur yang paling penting. Jika suatu organisasi /perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Dalam sistem pengendalian intern pada KPKNL Surakarta para petugas penyusun laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban sudah mendapat diklat dan pelatihan yang memadai, sehingga lebih kompeten dan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban (PPJ) yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Surakarta, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan yang ditemukan di dalam aktivitas akuntansi tersebut antara lain: dalam hal kelebihannya antara lain Dalam sistem akuntansi penyusunan laporan PPJ terdapat pemisahan pada fungsi pelayanan lelang yang mengolah data informasi lelang dan fungsi bendahara yang merupakan korektor laporan; Fungsi Pelayanan Lelang tidak dapat membuat laporan PPJ tanpa laporan pelaksanaan lelang dari fungsi Pejabat

Lelang; Sudah terdapat format standart laporan penyusunan PPJ sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Sedangkan kelemahannya yaitu sering terjadi keterlambatan penyampaian dokumen/informasi dari fungsi pejabat lelang ke fungsi pelayanan lelang dan fungsi bendahara yang biasanya terjadi pada pelaksanaan lelang di akhir bulan/periode; Waktu penyusunan laporan yang terlalu lama pada saat koreksi laporan pada fungsi bendahara, hal ini sering terjadi pada saat petugas di fungsi bendahara sedang tugas diluar kota.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa tentang penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

Faktor-faktor pendukung dalam penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, meliputi:

Lengkapya informasi pada Buku Register Permintaan Lelang; Buku Register Permintaan Lelang merupakan buku bantu pencatatan tentang penyampaian informasi pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang apakah dalam pelaksanaan lelang tersebut ada yang laku, tidak ada peminat (TAP), atau batal setelah pelaksanaan lelang selesai, di dalamnya berisi, tanggal pelaksanaan lelang, pemohon lelang, pejabat lelang, dan catatan banyaknya nomor risalah lelang berdasarkan jumlah objek yang dilelang; Tanda Bukti Masuk atau TBM merupakan laporan yang dibuat oleh pejabat lelang untuk melaporkan objek lelang yang laku terjual pada pelaksanaan lelang. Laporan TBM ini diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran KPKNL. Di dalam laporan TBM berisi pokok lelang, perhitungan bea lelang, pph dan data objek dan pemenang lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang; Tanda Bukti Kas Keluar (TBKK) merupakan laporan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran berdasarkan laporan TBM untuk melakukan penyerahan hasil lelang kepada pemohon lelang, dan memungut bea lelang dan pajak atas pelaksanaan lelang yang objek lelang tersebut laku.

Faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yaitu: keterlambatan penyampaian informasi hasil lelang oleh pejabat lelang kepada petugas pencatat register pelaksanaan lelang. Hal ini sering terjadi pada pelaksanaan lelang pada akhir bulan/periode pelaporan; Pencatatan pada Buku Register Permintaan Lelang yang kurang lengkap mengenai informasi pelaksanaan lelang. Misalnya kurang lengkapnya keterangan nomor risalah lelang, dan keterangan lelang batal; Keterlambatan penyampain laporan TBM ke bendahara pengeluaran, yang mengakibatkan tunggakan pada laporan periode berjalan. Biasanya terjadi saat pelaksanaan lelang pada akhir bulan/periode; Croscek laporan oleh bendahara yang terlalu lama, biasanya terjadi saat bendahara mendapat tugas dinas ke luar kota sehingga mengakibatkan proses croscek laporan menjadi lama;

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan analisis data, maka dilihat dari segi organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatat dan praktek yang sehat, sistem pengendalian intern yaitu Penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ) telah sesuai dengan teori.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang laporan perhitungan dan pertanggungjawaban (PPJ) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari angket pertanyaan yang kemudian diukur dengan skala indek menunjukkan total jawaban responden berjumlah 100 persen yang diimplementasikan terhadap katagori skor yang

telah ditentukan, yaitu berada pada kategori skor jawaban Ya = 100 persen yang berarti masuk dalam katagori Efektif.

Penyusunan laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian intern, dan petugas penyusun laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban sudah mendapat diklat dan pelatihan yang memadai, sehingga lebih kompeten dan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diketahui faktor-faktor pendukung dalam penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, meliputi:

Lengkapya informasi pada Buku Register Permintaan Lelang.; Buku Register Permintaan Lelang merupakan buku bantu pencatatan tentang penyampaian informasi pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang apakah dalam pelaksanaan lelang tersebut ada yang laku, tidak ada peminat (TAP), atau batal setelah pelaksanaan lelang selesai. di dalamnya berisi, tanggal pelaksanaan lelang, pemohon lelang, pejabat lelang, dan catatan banyaknya nomor risalah lelang berdasarkan jumlah objek yang dilelang.

Arsip Tanda Bukti Masuk (TBM), merupakan laporan yang dibuat oleh pejabat lelang untuk melaporkan objek lelang yang laku terjual pada pelaksanaan lelang. Laporan TBM ini diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran KPKNL. Di dalam laporan TBM berisi pokok lelang, perhitungan bea lelang, pph dan data objek dan pemenang lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.

Arsip Tanda Bukti Kas Keluar (TBKK), merupakan laporan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran berdasarkan laporan TBM untuk melakukan penyerahan hasil lelang kepada pemohon lelang, dan memungut bea lelang dan pajak atas pelaksanaan lelang yang objek lelang tersebut laku.

Diketahui juga faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, meliputi: Keterlambatan penyampaian informasi hasil lelang oleh pejabat lelang kepada petugas pencatat register pelaksanaan lelang. Hal ini sering terjadi pada pelaksanaan lelang pada akhir bulan/periode pelaporan; Pencatatan pada Buku Register Permintaan Lelang yang kurang lengkap mengenai informasi pelaksanaan lelang. Misalnya kurang leengkapnya keterangan nomor risalah lelang, dan keterangan lelang batal; Keterlambatan penyampain laporan TBM ke bendahara pengeluaran, yang mengakibatkan tunggakan pada laporan periode berjalan. Biasanya terjadi saat pelaksanaan lelang pada akhir bulan/periode; Croscek laporan oleh bendahara yang terlalu lama, biasanya terjadi saat bendahara mendapat tugas dinas ke luar kota sehingga mengakibatkan proses croscek laporan menjadi lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bin Ladjamudin (2005) *Analisis dan Desain Sistem Informasi*
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2000, *Statistik Induktif*, BPFE, Yogyakarta.
- Ferdian, 2010, *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada CV. Mitra Tanindo)* skripsi Program S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi#Istilah_informasi
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>
- Jogiyanto, HM. 2003. *Sistem Teknologi Informasi*. Edisi 1. Andi, Yogyakarta.
- Kresya Yudika Oktafany, 2010, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan pada PT. Bona Eras Jaya*
- Kusrini dkk (2007), *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server*

- Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Palgrave, Basingstoke
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Noeng Muhadjir. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 06 /KN/2009 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Putri Ayu Puspa Rengganis, 2012, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada Assure – Siskem Aneka Indonesia, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
- S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Santosa, P.B. 2007. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. <http://images.purbayubs.multiply.multiplycontent.com>.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.